

PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR: PERAN UKURAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT SEBAGAI KOMPONEN TATA KELOLA

Ghany Tofiq Handono¹, Widyahayu Warmmeswara Kusumastati²

¹Magister Sains Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Magister Sains Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

e-mail: ghany.handono@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, direksi, dan komite audit terhadap laporan keberlanjutan. Sementara ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2023. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, menghasilkan sampel akhir sebanyak 96 observasi perusahaan-tahun. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.

Kata kunci: Laporan Keberlanjutan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Direksi, Ukuran Komite Audit, Teori Pemangku Kepentingan, Teori Legitimasi

1. Pendahuluan

Berbagai Industri manufaktur Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun diiringi pula dengan tantangan keberlanjutan. Data (Badan Pusat Statistik, 2017) mencatat penambahan 4.000 unit perusahaan manufaktur selama periode 2000–2015, dengan industri makanan, tekstil, dan garmen sebagai kontributor utama. Didorong oleh daya tarik investasi dan pertumbuhan kelas menengah, Indonesia bahkan menargetkan posisi dalam 15 besar pusat manufaktur dunia (Asean Access, 2021). Namun, di balik pertumbuhan ini, muncul tantangan serius terkait keberlanjutan, terutama dampak lingkungan seperti polusi, limbah, dan eksploitasi sumber daya alam yang banyak diakibatkan oleh industri manufaktur, dengan Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil sampah plastik laut terbesar (66 juta ton/tahun) dan kontributor emisi gas rumah kaca (Aprilia, 2021).

Menanggapi hal tersebut, dorongan akan praktik dan transparansi keberlanjutan muncul melalui regulasi meskipun hal tersebut terkadang masih dianggap sebagai formalitas. Tren global telah mendorong adopsi praktik keberlanjutan melalui regulasi pelaporan CSR dan transparansi perusahaan di berbagai negara maju dan berkembang (Katamba & Nkiko, 2017). Indonesia merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Implementasi kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah pengungkapan keberlanjutan secara signifikan (PWC Indonesia, 2023). Namun, upaya ini belum sepenuhnya mengatasi masalah mendasar, karena laporan keberlanjutan sering kali dianggap sebagai formalitas belaka tanpa akuntabilitas yang memadai (Osobajo et al., 2022).

Maka dari itu, peran pengawasan melalui komponen tata kelola perusahaan diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pelaporan keberlanjutan dan standar global. Laporan keberlanjutan berisi data kegiatan, target, dan citra perusahaan di bidang lingkungan, sosial, ketenagakerjaan, serta kepuasan pelanggan, termasuk efisiensi energi, kebijakan kesetaraan, praktik bisnis etis, dan tata kelola perusahaan (Leal Filho et al., 2022). Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, mengadopsi standar *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai acuan utama (PWC Indonesia, 2023). Untuk mendukung pelaporan tersebut, struktur tata kelola yang melibatkan dewan komisaris, direksi, dan komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan (Wijayanti & Setiawan, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komponen tata kelola tersebut dapat meningkatkan upaya pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Cancela et al., 2020). Dalam penelitian (Cancela et al., 2020) & (Erin et al., 2022) ukuran dewan dan komite audit yang lebih besar cenderung meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, karena memberikan pengawasan lebih kuat, perspektif yang beragam, dan akurasi dalam pengungkapan informasi. Kemudian, dewan yang beranggotakan lebih luas juga terbukti lebih responsif terhadap kepentingan *stakeholders* dan lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja (*Environmental, Social & Governance*) ESG (Cancela et al., 2020) (Erin et al., 2022).

Akan tetapi, penelitian terdahulu juga menyatakan hasil yang sebaliknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aliniar & Wahyuni, 2017), menyatakan bahwa komponen-komponen tata kelola tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Begitu pula dengan penelitian (Aliyu, 2019) menemukan hubungan tidak signifikan antara ukuran dewan dan pengungkapan keberlanjutan. Kemudian, penelitian (Appuhami & Tashakor, 2017) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak selalu meningkatkan transparansi.

Walaupun hasil penelitian terdahulu beragam, kajian lebih lanjut masih dibutuhkan, terutama pada industri manufaktur dan korporasi besar. Sektor manufaktur memerlukan penelitian lanjutan mengingat aktivitas operasionalnya memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Singh & Sultan, 2017). Demikian halnya dengan perusahaan besar yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyusun laporan keberlanjutan akibat desakan kuat dari *stakeholders* dan kewajiban regulasi (Nguyen et al., 2021). Faktor lain yang turut berpengaruh adalah tuntutan kreditor akan transparansi, di mana menurut teori legitimasi, laporan ini berfungsi sebagai alat justifikasi operasional perusahaan di hadapan pemberi pinjaman (Chadha & Singhanian, 2024).

Pelaporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan pilar bisnis berkelanjutan, meskipun sering dianggap sekadar formalitas (Osobajo et al., 2022). Dalam teori pemangku kepentingan, laporan ini tetap penting untuk pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan lingkungan, meski konsep keberlanjutan masih kurang terdefinisi dibanding tata kelola (Mahmood et al., 2018). Di Indonesia, sektor manufaktur menghadapi tantangan antara ambisi pelaporan keberlanjutan dan dampak lingkungan yang meragukan kredibilitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor pendorong yang berupa komponen tata kelola, terhadap pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur yang terlisting di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Penelitian ini mengadopsi teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi dalam menganalisis dinamika hubungan antara perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan. (Manetti & Bellucci, 2017) menjelaskan bahwa kedua teori ini memberikan landasan konseptual bagi praktik pengungkapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) perusahaan. Sebagai entitas yang lebih terekspos di publik, perusahaan terbuka menghadapi tuntutan legitimasi yang

lebih kompleks dibanding pelaku ekonomi lain, termasuk kewajiban untuk memenuhi kontrak sosial implisit dan harapan *multi-stakeholder* (Buallay & Al-Ajmi, 2019).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara komponen tata kelola perusahaan yakni ukuran dewan komisaris, direksi dan komite audit terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terlisting di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam rentang waktu 2018-2023. Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari data *annual report* dan *sustainability report* perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat manfaat teoritis berupa pengembangan literatur dan bukti empiris lebih lanjut terkait komponen tata kelola perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Begitu pula memberikan manfaat praktis berupa pertimbangan baru dalam pengambilan keputusan investasi dan bisnis dan memberikan tolak ukur baru mengenai komponen tata kelola yang menunjang pengungkapan keberlanjutan perusahaan manufaktur.

2. Kajian Pustaka/Kajian teori

Teori Stakeholder

Menurut (Aliniar & Wahyuni, 2017) dalam teori *stakeholder*, perusahaan memiliki kewajiban yang meliputi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terbatas pada pemegang saham. Pendapat ini diperkuat oleh (Kivits & Sawang, 2021) yang mengemukakan empat prinsip utama: (1) mempertimbangkan dampak operasional terhadap berbagai pihak terkait, (2) memahami nilai-nilai dan pola perilaku *stakeholders*, (3) melakukan inovasi dalam struktur dan proses bisnis untuk strategi yang lebih menyeluruh, serta (4) menjaga keseimbangan dinamis antar berbagai kepentingan. Implementasi teori ini tercermin dalam regulasi pelaporan keberlanjutan yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan atas seluruh aktivitas operasionalnya.

Teori Legitimasi

Konsep legitimasi organisasi menurut (Li, 2019) mensyaratkan keselarasan nilai antara perusahaan dan masyarakat, menuntut adaptasi terus-menerus terhadap norma sosial untuk mendapatkan penerimaan. Dalam praktik akuntansi sosial dan lingkungan, legitimasi menjadi elemen penting karena perusahaan perlu menyesuaikan operasinya dengan standar masyarakat sekaligus membangun reputasi positif di mata pemangku kepentingan (Martins et al., 2020). Aprilia (2018) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen legitimasi dengan mengungkap capaian ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai wujud transparansi.

Pelaporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan mencakup informasi tentang kinerja perusahaan di bidang lingkungan, sosial, ketenagakerjaan, dan konsumen, termasuk aspek seperti efisiensi energi, kesetaraan, etika bisnis, dan tata kelola (Leal Filho et al., 2022). Laporan ini bertujuan meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan yang menghubungkan tanggung jawab sosial dengan kinerja finansial (Alta'any et al., 2024). Standar GRI G4 (2019) menekankan sifat komprehensif laporan keberlanjutan dalam mengungkap dampak positif dan negatif perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengaturan organisasi yang beroperasi dalam rerangka hukum, regulasi, dan harapan *stakeholders* yang terus berkembang (Clarke, 2022). mengharuskan adaptasi terhadap perubahan nilai masyarakat, termasuk meningkatnya pertimbangan aspek lingkungan dan sosial dalam operasi bisnis. Menurut (Nsour & Al-Rjoub, 2022), struktur tata kelola mencakup tiga komponen utama: (1) Dewan Komisaris sebagai pengawas utama dan perwakilan pemegang saham, (2) Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dan operasional, serta (3) Komite Audit untuk mengawasi proses audit,

pengendalian internal, dan integritas laporan keberlanjutan. Komposisi tiga komponen utama tata kelola tersebut, dapat mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan, di mana komposisi yang lebih besar meningkatkan efektivitas untuk mengadopsi praktik pengungkapan sukarela yang lebih komprehensif (Buallay & Al-Ajmi, 2019; Hu & Loh, 2018; Trisnawati et al., 2022; Yadav & Jain, 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2023, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu : (1) perusahaan yang sudah go public, (2) perusahaan yang menerbitkan Annual Report dan Sustainability Report pada 2018-2023, (3) perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang diteliti. menggunakan tehnik analisis pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report dan sustainability report perusahaan periode 2018–2023 yang diunduh dari sumber resmi (BEI dan situs perusahaan). Data tersebut diseleksi berdasarkan kriteria sampel, lalu dianalisis sesuai pengukuran variabel penelitian.

Pengungkapan sustainability report mengacu pada standar GRI yang mencakup kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian ini mengukur variabel tersebut dengan content analysis menggunakan skor biner (1 jika diungkapkan, 0 jika tidak) berdasarkan 91 indikator GRI-G4. Hasil analisis dihitung dalam bentuk indeks rasio:

$$\text{Indeks} : \frac{N_{i,t}}{K_{i,t}}$$

Keterangan :

N : Mewakili banyaknya item pengungkapan SR yang telah dipenuhi perusahaan

K : Keseluruhan item pengungkapan yang seharusnya ada sesuai panduan GRI-G4

Pengukuran variabel ukuran dewan komisaris, direksi dan komite audit, menggunakan perhitungan jumlah dewan komisaris, direksi dan komite audit, dalam periode tersebut. Kemudian, penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage. Untuk mengukur besarnya perusahaan, penelitian ini menggunakan ukuran sebagai berikut.

$$\text{Size} = \ln(TA_{it})$$

Kemudian leverage diukur menggunakan rasio DER (Debt to Equity Ratio) sebagai berikut.

$$\text{DER} = \frac{TL_{it}}{TA_{it}}$$

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Dewan Komisaris	96	2.00	15.00	5.9271	2.45912
Direksi	96	2.00	15.00	6.1563	2.62108
Komite Audit	96	2.00	4.00	3.0833	0.34540

GRI	96	0.27	0.53	0.3710	0.4404
Leverage	96	-7.73	8.12	0.8258	1.73277
Size	96	12.27	19.92	16.2838	1.69943

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki rata-rata sebesar 5,9271, dengan nilai terendah 2, tertinggi 15, dan standar deviasi 2,45912. Dapat diartikan bahwa, perusahaan-perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini, dalam periode 2018-2023 memiliki rata-rata jumlah dewan komisaris sebanyak 6 . Ukuran direksi memiliki rata-rata sebesar 6,1563, dengan nilai terendah 2, tertinggi 15, dan standar deviasi 2,62108. Dapat diartikan bahwa, perusahaan-perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini, dalam periode 2018-2023 memiliki rata-rata jumlah direksi sebanyak 6. Ukuran komite audit memiliki rata-rata sebesar 3,0833, dengan nilai terendah 2, tertinggi 4, dan standar deviasi 0,34540. Dapat diartikan bahwa, perusahaan-perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini, dalam periode 2018-2023 memiliki rata-rata ukuran komite audit sebanyak 3. *Sustainability Report* memiliki rata-rata sebesar 0,3710, dengan nilai terendah 0,21, tertinggi 0,61, dan standar deviasi 0,07436. Dapat diartikan bahwa, perusahaan-perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini, dalam periode 2018-2023 memiliki rata-rata nilai rasio index *Sustainability Report* sebesar 0,3710.

Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Nilai probabilitas dari hasil uji F sebesar 0,00 (kurang dari 0,05). Disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Seluruh variabel bebas dan variabel kontrol secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks laporan keberlanjutan.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R-squared sebesar 0.391 atau 39,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol penelitian ini hanya mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat (indeks laporan keberlanjutan) sebesar 39,1%. Sisanya sebesar 60,9% tidak dapat dijelaskan. Hal ini menunjukkan masih ada variabel lain yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan SPSS. Ringkasan hasil uji t untuk membuktikan hipotesis penelitian disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Berganda

Variabel	Koefisien	B	Kesimpulan	Hipotesis
Dewan Komisaris	0,020	0,013	Signifikan	H1 Terbukti
Direksi	0,020	-0,011	Signifikan	H2 Terbukti
Komite Audit	0,012	-0,058	Signifikan	H3 Terbukti

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laporan keberlanjutan terbukti. Hasil uji t variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai probabilitas sebesar 0,020 (di bawah 0,05). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi kepada semua *stakeholder*, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan (Wang, 2017). Dewan komisaris yang lebih besar cenderung memiliki representasi yang lebih luas dari berbagai *stakeholder*, sehingga mendorong perusahaan untuk

lebih transparan dalam melaporkan kinerja keberlanjutan. Kemudian, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk mempertahankan legitimasi sosialnya dengan memenuhi harapan masyarakat dan *stakeholder* terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (Tran et al., 2021). Dengan lebih banyak anggota, dewan dapat memastikan bahwa laporan keberlanjutan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik yang bertanggung jawab, sehingga meningkatkan legitimasi perusahaan.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Ukuran direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laporan keberlanjutan terbukti. Hasil uji t variabel ukuran direksi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,020 (di bawah 0,05). Teori *Stakeholder* menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham yang mencakup kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas yang mewakili kepentingan masyarakat (Wang, 2017). Direksi yang lebih besar dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan praktik keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan. Dalam teori legitimasi, perusahaan perlu mempertahankan legitimasi sosialnya dengan memenuhi harapan pemangku kepentingan salah satunya dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Tran et al., 2021).

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laporan keberlanjutan terbukti. Hasil uji t variabel ukuran komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,012 (di bawah 0,05). Teori *stakeholder* dan teori legitimasi sama-sama menekankan pentingnya transparansi informasi untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan masyarakat (Deigh et al., 2020). Dalam konteks perusahaan yang terus berkembang, kompleksitas hubungan *stakeholder* memerlukan penguatan *governance* melalui komite audit guna menjamin keseimbangan kepentingan dan kredibilitas laporan keberlanjutan (Leal Filho et al., 2022). Oleh karena itu, jumlah anggota komite audit menjadi faktor penentu kualitas *sustainability report* suatu entitas bisnis. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya ukuran komite audit maka akan meningkatkan tingkat pelaporan keberlanjutan perusahaan.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh *stakeholder*, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Dewan komisaris yang lebih besar serta komite audit yang kuat berperan penting dalam meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan, sehingga perusahaan dapat memenuhi harapan sosial dan mempertahankan legitimasinya. Ukuran dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit yang lebih besar berkorelasi positif dengan kualitas pengungkapan *sustainability report*, karena memungkinkan representasi kepentingan yang lebih luas dan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, penguatan struktur tata kelola perusahaan, khususnya melalui perluasan dewan dan komite audit, menjadi kunci dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Aliniar, D., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 15(1).
- Aliyu, U. S. (2019). Board characteristic and corporate environmental reporting in Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 2–17. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2018-0030>

- Alta'any, M., Tauringana, V., Zalata, A., & Achiro, L. O. (2024). Unpacking sustainability reporting dimensions: the impact of board characteristics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2023-0568>
- Altamirano, M. A., & Sloley, A. A. (2023). *Corporate Governance* (pp. 1–11). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6845-6.ch001>
- Anyigbah, E., Kong, Y., Edziah, B. K., Ahoto, A. T., & Ahiaku, W. S. (2023). Board Characteristics and Corporate Sustainability Reporting: Evidence from Chinese Listed Companies. *Sustainability*, 15(4), 3553. <https://doi.org/10.3390/su15043553>
- Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure: An Analysis of Australian Firms. *Australian Accounting Review*, 27(4), 400–420. <https://doi.org/10.1111/auar.12170>
- Aprilia, A. (2021). *Waste Management in Indonesia and Jakarta: Challenges and Way Forward*.
- Baatwah, S. R., Bajaher, M., & Asiri, M. (2023). Board of directors, COVID-19, and corporate social responsibility monetary performance: direct and interaction effects analysis. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2023-0430>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV tahun 2017*.
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2019). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>
- Cancela, B. L., Neves, M. E. D., Rodrigues, L. L., & Gomes Dias, A. C. (2020). The influence of corporate governance on corporate sustainability: new evidence using panel data in the Iberian macroeconomic environment. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(4), 785–806. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2020-0068>
- Chadha, G., & Singhania, M. (2024). Demystifying the influence of debt providers' preferences on sustainability reporting: a firm-level meta-analytical inquiry. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(10), 14704–14747. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31552-y>
- Clarke, T. (2022). *Comparative Corporate Governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429294648>
- Deigh, L., Farquhar, J., & Robson, J. (2020). *Building Legitimacy for CSR in Banking through Marketing Communications: Enlightenment from Sub-Saharan Africa: An Abstract* (pp. 209–210). https://doi.org/10.1007/978-3-030-42545-6_59
- Detthamrong, U., Chancharat, N., & Vithessonthi, C. (2017). Corporate governance, capital structure and firm performance: Evidence from Thailand. *Research in International Business and Finance*, 42, 689–709. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.011>
- Erin, O., Adegboye, A., & Bamigboye, O. A. (2022). Corporate governance and sustainability reporting quality: evidence from Nigeria. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(3), 680–707. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2020-0185>
- Gebrayel, E., Jarrar, H., Salloum, C., & Lefebvre, Q. (2018). Effective association between audit committees and the internal audit function and its impact on financial reporting quality: Empirical evidence from Omani listed firms. *International Journal of Auditing*, 22(2), 197–213. <https://doi.org/10.1111/ijau.12113>
- Hu, M., & Loh, L. (2018). Board Governance and Sustainability Disclosure: A Cross-Sectional Study of Singapore-Listed Companies. *Sustainability*, 10(7), 2578. <https://doi.org/10.3390/su10072578>

- Ika, S. R., Nugroho, J. P., Achmad, N., & Widagdo, A. K. (2021). The impact of corporate governance on environmental reporting: Evidence from the Indonesian manufacturing industry. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012030>
- Jain, T., & Zaman, R. (2020). When Boards Matter: The Case of Corporate Social Irresponsibility. *British Journal of Management*, 31(2), 365–386. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12376>
- Jizi, M. (2017). The Influence of Board Composition on Sustainable Development Disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 26(5), 640–655. <https://doi.org/10.1002/bse.1943>
- Katamba, D., & Nkiko, C. M. (2017). *The CSR Communications and Reporting Landscape in Developing Countries* (pp. 343–358). https://doi.org/10.1007/978-3-319-44700-1_19
- Kivits, R., & Sawang, S. (2021). *Stakeholder Theory* (pp. 1–8). https://doi.org/10.1007/978-3-030-70428-5_1
- Leal Filho, W., Coronado-Marín, A., Salvia, A. L., Silva, F. F., Wolf, F., LeVasseur, T., Kirrane, M. J., Doni, F., Paço, A., Blicharska, M., Schmitz, M., Grahl, A. T., & Moggi, S. (2022). International Trends and Practices on Sustainability Reporting in Higher Education Institutions. *Sustainability*, 14(19), 12238. <https://doi.org/10.3390/su141912238>
- Li, J. (2019). Moral capital and organizational legitimacy. In *China's Quest for Innovation* (pp. 149–168). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351019743-8>
- Lucia, L., & Panggabean, R. R. (2018). THE EFFECT OF FIRM'S CHARACTERISTIC AND CORPORATE GOVERNANCE TO SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE. *SEIJ (Social Economics and Ecology International Journal)*, 5(1).
- Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does Corporate Governance Affect Sustainability Disclosure? A Mixed Methods Study. *Sustainability*, 10(1), 207. <https://doi.org/10.3390/su10010207>
- Manap, M. I. A., Ya', N. S., acob, N. A., & Alrazi, B. (2022). Audit committee competencies and corporate disclosure transparency of Malaysian government linked companies. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 10(2/3), 345. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.126238>
- Manetti, G., & Bellucci, M. (2017). Stakeholder and legitimacy frameworks as applied to Behavioural Accounting Research. In *The Routledge Companion to Behavioural Accounting Research* (pp. 83–100). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315710129-7>
- Martins, A., Gomes, D., & Branco, M. C. (2020). Managing Corporate Social and Environmental Disclosure: An Accountability vs. Impression Management Framework. *Sustainability*, 13(1), 296. <https://doi.org/10.3390/su13010296>
- Nguyen, T. H., Vu, Q. T., Nguyen, D. M., & Le, H. L. (2021). Factors Influencing Corporate Social Responsibility Disclosure and Its Impact on Financial Performance: The Case of Vietnam. *Sustainability*, 13(15), 8197. <https://doi.org/10.3390/su13158197>
- Nsour, M. F., & Al-Rjoub, S. A. M. (2022). Building a corporate governance index (JCGI) for an emerging market: case of Jordan. *International Journal of Disclosure and Governance*, 19(2), 232–248. <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00139-9>
- Osobajo, O. A., Oke, A., Lawani, A., Omotayo, T. S., Ndubuka-McCallum, N., & Obi, L. (2022). Providing a Roadmap for Future Research Agenda: A Bibliometric Literature Review of Sustainability Performance Reporting (SPR). *Sustainability*, 14(14), 8523. <https://doi.org/10.3390/su14148523>
- PWC Indonesia. (2023). *The Most Recent State and Future Directions of Sustainability Reporting Indonesia*.

- Restu, M., Yuliandri, W. S., & Nurbaiti, A. (2017). PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *E-Proceeding of Management*, 4(3).
- Rudyanto, A., & Veronica Siregar, S. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>
- Singh, K., & Sultan, I. (2017). Framework for Sustainability Performance Assessment for Manufacturing Processes- A Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 73, 012029. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/73/1/012029>
- Sofa, F. N., & Respati, N. W. (2020). Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
- Tran, M., Beddewela, E., & Ntim, C. G. (2021). Governance and sustainability in Southeast Asia. *Accounting Research Journal*, 34(6), 516–545. <https://doi.org/10.1108/ARJ-05-2019-0095>
- Trisnawati, R., Wardati, S. D., & Putri, E. (2022). The Influence of Majority Ownership, Profitability, Size of the Board of Directors, and Frequency of Board of Commissioners Meetings on Sustainability Report Disclosure. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 94–104. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17783>
- Wahyudi, S. M. (2021). The Effect of Corporate Governance and Company Characteristics on Disclosure of Sustainability Report Companies. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 94–99. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.929>
- Wang, M.-C. (2017). The Relationship between Firm Characteristics and the Disclosure of Sustainability Reporting. *Sustainability*, 9(4), 624. <https://doi.org/10.3390/su9040624>
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2024). The Nexus Between Board Diversity and Sustainability Reporting: The Moderating Role of Supervisory Effectiveness and Quality in a Two-Tier Board System. *Sage Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241259159>
- Yadav, P., & Jain, A. (2023). Sustainability disclosures and corporate boards: a stakeholder approach to decision-making. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(5), 1027–1047. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2022-0279>
- Aliniar, D., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 15(1).
- Aliyu, U. S. (2019). Board characteristic and corporate environmental reporting in Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 2–17. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2018-0030>